

**PEMBINAAN TERITORIAL DESA DI KECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015**

Oleh :

Rizki Wibowo

Email : wiboworizki21@yahoo.com

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Guidance of Territorial Center Village in Balai Jaya District of Rokan Hilir Regency in 2015 is all the effort, work, and activities related to the design, development, deployment, and control potential of the region with all its aspects conducted by the Military Command 08/Bagan Sinembah empowerment strength region in Balai Jaya District of Rokan Hilir Regency, in the interests of national defense essentially to embody Oneness People TNI and TNI fundamental duty to succeed.

This research was conducted in Balai Jaya Distric of Rokan Hilir Regency which is one target area Military Command 08/Bagan Sinembah. The method used in this research is descriptive qualitative method, which in this study researchers tried to explain the implementation of The Guidance of Territorial Center Village in Balai Jaya District of Rokan Hilir Regency in 2015 were carried out using three methods The Guidance of Territorial Center, namely Bhakti TNI, Fostering Resilience Region, and the Development of Social Communication. The data collection techniques in this study using the technique of in-depth interviews and documentation relevant facts and data collection about The Guidance of Territorial Center Village in Balai Jaya District of Rokan Hilir Regency in 2015. Furthermore, the data obtained from the study site will be processed and analyzed further by way of outlining the facts which has been found from the study site.

From the interview to the informant and based on the data and information obtained by researchers when doing research on-site research, it can be concluded that the implementation of The Guidance of Territorial Center Village in Balai Jaya District of Rokan Hilir Regency in 2015, conducted by the Military Command 08/Bagan Sinembah, has not been implemented optimally, there are still some obstacles in its implementation, both internally and externally. Inhibiting factors internal include: infrastructure is inadequate, there is a lack of personnel, the low level of welfare Babinsa, while factors external resistor among others : components outside the military who do not fully understand the coaching Territorial Army, as well as the influence globalization and the times that make awareness to defend the country, patriotism, and national awareness among the people especially the younger generation, increasingly weakened.

Keywords: The Guidance Of Territorial Center, Military Command, Defence Area Empowerment

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, dihadapkan pada permasalahan teritorial yang bersifat spesifik, permasalahan teritorial tersebut tentunya akan berpotensi mengancam ketahanan nasional. Dalam rangka menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta dalam upaya mengatasi permasalahan teritorial yang muncul di wilayah negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur “*geostrategi*” yang baik, salah satunya adalah Pembinaan Teritorial (Binter).

Dilihat dari perkembangan sejarahnya, Pembinaan Teritorial merupakan proses institusionalisasi dari strategi militer yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utamanya. Proses institusionalisasi strategi perang gerilya yang sebenarnya bersifat tentatif ini bergeser menjadi bagian permanen dari strategi pertahanan nasional sejak pengadopsian Doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Pengadopsian doktrin ini menempatkan Pembinaan Teritorial sebagai strategi pertahanan matra darat yang dikembangkan untuk mengantisipasi permasalahan teritorial yang terdiri dari perpaduan dinamika unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial.

Usaha antisipasi tersebut dilakukan dengan mengembangkan konsep Pembinaan Teritorial yang diarahkan untuk memperoleh suatu kekuatan kewilayahan, dimana unsur geografi sebagai ruang juang, demografi sebagai alat juang, dan kondisi sosial sebagai kondisi juang yang tangguh bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Bila disederhanakan, Pembinaan Teritorial dapat diartikan sebagai pembinaan terhadap segenap sumber daya nasional yang berada dalam batas wilayah geografis tertentu untuk mendukung kepentingan nasional, termasuk

di dalamnya kepentingan pertahanan. Pembinaan Teritorial bagi TNI merupakan usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh serta mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat, dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, dimana secara tersurat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “*Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Sebagai alat pertahanan negara yang merupakan bagian integral dari Pemerintah, sudah menjadi kewajiban TNI untuk membantu pemerintah di daerah dalam upaya mewujudkan ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diupayakan melalui sebuah metode “*geostrategik*” yang disebut dengan Pembinaan Teritorial. Peran TNI tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2b mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) poin ke-8 dan 9, yang menyebutkan bahwa TNI memiliki kewajiban untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) serta membantu tugas pemerintahan di daerah, dengan demikian sudah sewajarnya bagi TNI untuk membantu pemerintah di daerah termasuk tugas menyejahterakan masyarakat.

Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD mulai dari Komando

Daerah Militer (Kodam), Komando Rayon Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil) sangat besar perannya dalam membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan nasional. Melalui peran Satkowil yang tersebar di wilayah Indonesia, proses pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas keamanan nasional dapat dipelihara dengan baik. Peran Satkowil sebagai sistem deteksi dini ditengah masyarakat selama ini dapat mencegah terjadinya berbagai ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional. Ancaman separatisme, terorisme, dan radikalisme dapat diantisipasi oleh Satkowil, sehingga menunjang proses pembangunan nasional yang saat ini sedang giat-giatnya dicanangkan oleh pemerintah. Dengan Babinsa sebagai ujung tombak ditengah masyarakat, maka segala gerakan dan manuver yang membahayakan terhadap keutuhan NKRI dapat ditangkal dengan cepat. Melalui metode Bhakti TNI, Bintahwil, dan Binkomsos, Satkowil juga membantu pemerintah dalam membangun sarana prasarana/ infrastruktur yang menunjang jalannya pembangunan nasional.

Sebagai salah satu Satkowil di jajaran Kodim 0303/Bengkalis, Koramil 08/Bagan Sinembah menyelenggarakan Pembinaan Teritorial, dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kecamatan di wilayah binaannya, dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dan mendukung tugas pokok Kodim 0303/Bengkalis. Dalam menyelenggarakan Pembinaan Teritorial, Koramil 08/Bagan Sinembah memiliki wilayah tugas sebanyak 4 Kecamatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bagan Sinembah.
2. Kecamatan Bagan Sinembah Raya.
3. Kecamatan Balai Jaya.
4. Kecamatan Simpang Kanan.

Sebagai suatu kecamatan yang baru dimekarkan dari kecamatan induk, Kecamatan Balai Jaya memerlukan suatu perhatian lebih di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kondisi infrastruktur masih minim dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balai Jaya masih belum terpenuhi. Saat ini, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Balai Jaya masih berada pada kategori ekonomi pra sejahtera, dimana mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan (kelapa sawit dan karet). Ditambah lagi ketersediaan lapangan pekerjaan di Kecamatan Balai Jaya yang masih belum memadai, sehingga menambah jumlah pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, maka muncul berbagai permasalahan sosial.

Dengan berbagai kondisi diatas, dikhawatirkan masyarakat Kecamatan Balai Jaya menjadi lemah dan tak berdaya jika ditinjau dari perspektif ketahanan wilayah. Atas dasar hal tersebut, maka Koramil 08/Bagan Sinembah melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan dan menyelenggarakan Pembinaan Teritorial sesuai dengan petunjuk Kodim 0303/Bengkalis dengan menggunakan 3 metode, yaitu Bhakti TNI, Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil), dan Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos). Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial ini dianggap mampu mewujudkan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Balai Jaya serta diharapkan dapat membantu pemerintah Kecamatan Balai Jaya dalam hal percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar penyelenggaraan Pembinaan Teritorial dapat berjalan optimal serta agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Balai Jaya, maka ditugaskan 7 orang Apkowil (Aparat Komando Kewilayahan) atau yang biasa disebut dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Adapun peran Babinsa adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di wilayah Kecamatan Balai Jaya. Berikut adalah personel Babinsa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir :

1. Pelda Suroyo
2. Serka Haripin
3. Serka Suwardi
4. Serda Eris Saputra
5. Koptu Hamdani Harahap
6. Koptu Abu Samma Hasibuan
7. Praka Desman Rumahorbo

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah di wilayah Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang dan identifikasi masalah yang diperoleh, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015?

Kerangka Teoritis

1. Pembinaan Teritorial

Doktrin Teritorial Nusantara menyebutkan bahwa pembinaan diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan

perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan arti kata dari teritorial adalah bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara dengan batas-batas tertentu. Kemudian secara luas, teritorial berarti sebagian dari permukaan bumi, terdiri atas daratan, perairan, dan ruang udara dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasional. Dengan demikian sudah tersimpul unsur ruang semesta negara dengan segenap isinya (sosiogeografis), baik yang merupakan daya kekuatan maupun daya kemampuan, baik kekurangannya maupun kelemahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik yang bersifat materiil maupun spiritual.

Dari kedua pengertian tersebut, sesuai dengan Buku Pedoman Praktis Aparat Teritorial, yang dimaksud dengan Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengerahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan kekuatan wilayah sebagai RAK (Ruang, Alat, dan Kondisi) Juang guna kepentingan pertahanan negara yang hakekatnya untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat guna menyukseskan tugas pokok TNI. Pembinaan Teritorial dapat dilaksanakan oleh TNI secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur-unsur diluar TNI untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Pembinaan Teritorial pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang mengatur tentang

hak pembelaan negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishankamneg) yang menjadi fungsi dan peran TNI AD. Pembinaan Teritorial bercirikan kewilayahan, kerakyatan, dan kesemestaan, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen bangsa. Wujud Pembinaan Teritorial merupakan suatu sistem pembinaan yang digali dari pengalaman bersenjata untuk menegakkan keutuhan negara, dengan berpegang teguh pada konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjuangan TNI, Pembinaan Teritorial telah teruji aktivitasnya untuk menangkal berbagai peristiwa nasional maupun sektoral yang bercorak kewilayahan sehingga dapat digunakan sebagai upaya untuk mengelola potensi kewilayahan. Konsepsi Pembinaan Teritorial dalam mengelola kekuatan pertahanan di daerah yang dikembangkan TNI pada saat ini berbeda dengan konsep lama (Hankamrata), melainkan sesuai konsep pertahanan menyeluruh (*total defence*). Dalam konsepsi Hankamrata, rakyat menjadi “pagar manusia” di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam). Sementara dalam *total defence*, rakyat diberi pelatihan dan keahlian, sehingga dapat menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara.

2. Fungsi Pertahanan Teritorial

Teori yang berkaitan dengan fungsi pertahanan teritorial ini sangat banyak dan berbeda satu dengan yang lain. Fungsi pertahanan teritorial ini sangat mengakar pada teori perang Karl Von Clausewitz, dimana politik pemerintah, kualitas profesional tentara, dan sikap masyarakat merupakan komponen yang memainkan peran yang sama pentingnya dalam perang. Sebab, perang dalam pandangan Karl Von Clausewitz bukan hanya terbatas pada aktivitas militer yang berdimensi militer, tetapi juga mencakup tindakan atau aktivitas politik, sehingga perang merupakan

kelanjutan politik dengan cara lain. Namun fungsi pertahanan teritorial sebagai konsekuensi dianutnya doktrin perang total (*total defence*) yang mengakar pada gagasan Karl Von Clausewitz, hanya berlaku selama perang berlangsung, pada masa damai fungsi ini bukanlah lagi sebagai fungsi darurat militer, melainkan menjadi fungsi intervensi militer dalam politik.

Indonesia memiliki pengalaman terkait fungsi pertahanan teritorial pada saat melakukan perang kemerdekaan melawan Belanda. Ketika dalam perang kemerdekaan pertama, tentara Indonesia di segala front berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda, yang memiliki keunggulan teknologi dan persenjataan, sehingga memaksa pimpinan tentara Indonesia untuk mengubah strategi perang. Strategi tersebut bermaksud menetralsir keunggulan teknologi dan persenjataan pasukan Belanda dengan memanfaatkan wilayah dan rakyat yang bersama-sama dengan tentara Indonesia melakukan perlawanan. Strategi baru ini diterapkan pada perang kemerdekaan kedua dan ternyata berhasil baik. Gerilya rakyat bersama tentara Indonesia berhasil memutus garis komunikasi pasukan Belanda dimana-mana. Pos-pos Belanda yang tersebar diserang terus menerus sehingga memakan banyak korban jiwa dan harus ditarik. Itu semua memaksa Belanda dalam posisi defensif tanpa dapat mengambil inisiatif untuk kembali menekan tentara Indonesia. Setiap usaha Belanda untuk menyerang selalu dapat diketahui sebelumnya melalui intelijen yang didukung oleh peran rakyat.

Keberhasilan perang gerilya akan sangat bergantung pada keterkaitan antara rakyat dengan pelaku gerilya. Dalam Doktrin Sistem Pertahanan Semesta, dikenal dengan istilah perang rakyat semesta yang mencerminkan adanya dukungan rakyat sebagaimana yang dirumuskan oleh Jenderal A.H Nasution, dalam rangka perang

kemerdekaan menghadapi penjajah Belanda. Dalam strategi ini, tentara Indonesia hanya mau bertempur atas pilihan dan kehendak sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa pertahanan di darat lebih membawa hasil positif bagi pertahanan suatu negara jika pertahanan konvensional didukung oleh pertahanan teritorial yang bersifat tidak konvensional. Pertahanan teritorial adalah pertahanan yang tidak terikat pada pertahanan posisi atau garis tertentu, melainkan wilayah sebagai objek yang harus dipertahankan. Dalam pertahanan teritorial, pertempuran dilakukan apabila menguntungkan pihak pertahanan.

Pasca pemerintahan gerilya, fungsi pertahanan teritorial yang mencakup tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan tetap dilaksanakan oleh TNI AD. Bahkan Jenderal Abdul Haris Nasution kembali menegaskan bahwa fungsi kedua TNI adalah fungsi pertahanan teritorial, yang gunanya adalah untuk menggalang pertahanan dan perlawanan rakyat. Oleh karena itu, fungsi pertahanan teritorial menjadi problematik bukan saja karena fungsi ini merupakan pengambilalihan fungsi pemerintahan daerah, tetapi juga dianggap oleh TNI sebagai bagian dari penafsiran fungsi pertahanannya. Problematic karena fungsi yang diartikan sebagai proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi nasional untuk dijadikan kekuatan pertahanan militer dianggap sebagai bagian dari tugas pokok militer. Menurut mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syanakri, pengertian Pembinaan Teritorial tidak hanya meliputi proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diarahkan bagi kepentingan pertahanan, tetapi juga proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi untuk dijadikan kekuatan pertahanan.

3. Sistem Pertahanan Semesta

Sistem pertahanan Indonesia sesuai dengan doktrin pertahanan yang dianut adalah Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), dimana melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, serta secara dini dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Sistem Pertahanan Semesta ini bersumber dari pengalaman sejarah pejuang perang kemerdekaan yang menempatkan TNI dalam posisi sentral, baik dalam perlawanan melawan Belanda maupun penyelenggaraan fungsi pertahanan, terutama di daerah-daerah perjuangan bersenjata.

Jika melihat dari pengalaman sejarah, Indonesia saat ini terbentuk oleh sebuah pandangan yang berasal dari doktrin pertahanan mendasar yang berakar dari berbagai pengalaman gerakan pemberontakan di masa lampau. Tiga elemen yang mendasari cara pandang bangsa Indonesia yaitu, (1) Konsep mengenai sebuah negara yang berintegrasi tunggal dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan; (2) Konsep ketahanan nasional, persatuan unsur-unsurnya yang berbeda dan keinginan untuk mempertahankan diri sendiri; (3) Konsep Sistem Pertahanan Semesta. Doktrin Sistem Pertahanan Semesta Indonesia dibuat untuk memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki agar dapat memberikan dukungan dalam menghadapi setiap ancaman insurjensi dari manapun. Doktrin ini berkembang dari pengalaman selama masa revolusi nasional (1945-1950) dan selanjutnya saat menghadapi pemberontakan PKI serta pemberontakan DI/TII maupun gerakan separatis lainnya. Doktrin ini melibatkan mobilisasi seluruh warga sipil dan sumber daya militer,

sekaligus sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap perlawanan terhadap kemungkinan insurjensi. Elemen utama yang diperlukan dalam menghadapi insurjensi diantaranya adalah : (1) Aparat intelijen yang aktif (2) Aparat teritorial yang mampu menyatukan TNI dengan Rakyat (3) Aparat Kepolisian yang berfungsi baik (4) Komponen Cadangan yang terlatih serta dapat digerakkan setiap saat (5) Sistem komunikasi massal yang teratur (6) Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial dari angkatan bersenjata.

Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan segenap potensi nasional dalam pembelaan negara diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Hubungan unik itu adalah bahwa Pasal 27 Ayat (3) yang sekarang berada di Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, berasal dari Pasal 30 Ayat (1) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hubungan ini membawa konsekuensi dan implementasi yang sangat besar mengingat kesadaran bela negara sebagai representasi dasar kesadaran tentang pertahanan negara sudah tidak lagi berada dalam kerangka pertahanan negara, tetapi berada dalam kerangka hak dan kewajiban warga negara. Masalah pertahanan negara adalah masalah seluruh warga negara, sebab masalah pertahanan negara sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, maka dari itu seluruh warga negara memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Pembahasan

1. Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya, maka Koramil 08/Bagan Sinembah sebagai Satkowil penyelenggara Pembinaan Teritorial di wilayah tersebut melakukan Pembinaan Fungsi (Binfung) terhadap kegiatan Babinsa di wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempersiapkan dan membentuk Apkowil/Babinsa yang mampu menjalankan tugas-tugas Pembinaan Teritorial sesuai dengan sikap dan kemampuan teritorial sehingga mampu mendukung tugas dari satuan. Bentuk pembinaan terhadap fungsi Babinsa yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Teknis Teritorial (Latnis Ter)
- b. Pendayagunaan Koramil Model
- c. Kegiatan Jam Komandan

Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir, Koramil 08/Bagan Sinembah menggunakan 3 metode diantaranya adalah :

A. Bhakti TNI

Bhakti TNI merupakan perwujudan Dharma Bhakti TNI sebagai alat pertahanan negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI, dilaksanakan bersama-sama instansi pemerintah terkait dan komponen bangsa lainnya dalam rangka tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta, serta membantu tugas pemerintah di daerah dalam menangani permasalahan sosial di daerah. Tujuan dari kegiatan Bhakti TNI ini adalah untuk membantu otoritas sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum dan juga membantu percepatan pembangunan di daerah serta mewujudkan beberapa sasaran dalam Pembinaan Teritorial.

Kegiatan Bhakti TNI yang dilaksanakan pada tahun 2015, terbagi menjadi 2 bagian, pada semester pertama kegiatan Bhakti TNI ini dilaksanakan melalui kegiatan gotong-royong membersihkan desa yang dilakukan oleh Babinsa bersama-sama dengan masyarakat dan komponen terkait lainnya. Kemudian pada semester kedua kegiatan Bhakti TNI ini dilaksanakan melalui kegiatan program pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban di beberapa kepenghuluan/kelurahan yang berada di wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI di Kecamatan Balai Jaya pada Tahun 2015 :

1) Kegiatan Gotong-Royong Babinsa Bersama Masyarakat dan Komponen Lainnya

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kebersihan, keindahan, serta kesehatan di lingkungan sekitar kepenghuluan/kelurahan yang berada di Kecamatan Balai Jaya. Selain itu, kegiatan Bhakti TNI (Karya Bhakti TNI) ini bertujuan untuk menciptakan Kemanunggalan TNI dan Rakyat serta agar mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar.

2) Program Pembuatan Jamban Keluarga Bagi Masyarakat Miskin Yang Belum Memiliki Jamban

Kegiatan Bhakti TNI pada semester kedua tahun 2015 yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah adalah program pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan di sekitar satuan maupun di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, menyebutkan bahwa 30% keluarga di Indonesia belum memiliki fasilitas jamban keluarga. Angka ini setara dengan 20 juta keluarga atau 80 juta orang di Indonesia yang belum memiliki jamban keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan Bhakti TNI Koramil 08/Bagan Sinembah pada semester kedua tahun 2015 yang lalu, diarahkan untuk melaksanakan pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban. Adapun Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Perintah Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/645/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 tentang perintah agar merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan Program Karya Bhakti TNI Satkowil Semester II Tahun 2015, di satuan masing-

masing dengan kegiatan pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban. Pelaksanaan program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan program gerakan masyarakat membangun sejuta jamban untuk keluarga di seluruh Indonesia. Program yang diberi nama “Gema Sang Juara” ini, diharapkan mampu mengurangi kebiasaan masyarakat dalam membuang kotoran di sembarangan tempat.

Sebagai bagian dari Bhakti TNI, maka pada semester kedua tahun 2015 yang lalu, Koramil 08/Bagan Sinembah telah berhasil membangun sebanyak 16 jamban keluarga yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah yang belum memiliki jamban keluarga.

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat diulas mengenai pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI di Kecamatan Balai Jaya. Meskipun terdapat sedikit kendala terkait anggaran, pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI Koramil 08/Bagan Sinembah sudah terlaksana dengan baik dan dianggap sangat membantu masyarakat di Kecamatan Balai Jaya. Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan Bhakti TNI tersebut, maka TNI dan Rakyat semakin Manunggal dan erat hubungannya, sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam hal pemberdayaan pertahanan wilayah dan dalam usaha membangun kekuatan demi terselenggaranya pertahanan negara.

B. Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil)

Kegiatan Bintahwil merupakan bagian dari penyelenggaraan Pembinaan Teritorial yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan

tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Pelaksanaan Bintahwil secara umum diimplementasikan melalui kegiatan yang dimensinya adalah pembinaan karakter masyarakat dan generasi muda, yang bertujuan untuk membentuk moral dan jati diri serta budi pekerti bagi masyarakat dan generasi muda, agar terbentuk individu yang bermental dan jiwa positif sehingga mampu menjadi kekuatan pendukung bagi TNI AD sesuai dengan Doktrin Sistem Pertahanan Semesta. Adapun kegiatan pembinaan generasi muda yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah dan Babinsa yang bertugas di Kecamatan Balai Jaya dalam rangka Pembinaan Pertahanan Wilayah di wilayah tersebut, terlaksana dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melatih siswa/siswi SMA/Sederajat di wilayah Kecamatan Balai Jaya terkait materi PBB (Pelatihan Baris Berbaris) dan membentuk tim Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) dalam rangka persiapan HUT RI Ke-70 Tahun 2015.
2. Memberikan penyuluhan kepada generasi muda dan siswa/siswi SMA/Sederajat dengan menyampaikan materi terkait Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, Koramil 08/Bagan Sinembah melalui Babinsa yang bertugas di wilayah tersebut, melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan membentuk Perlawanan Rakyat (Wanra) dalam rangka Pembinaan Ketahanan Wilayah dan mendukung terselenggaranya Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya. Saat ini terdapat 40 orang Wanra binaan Koramil 08/Bagan Sinembah. Adapun tugas dari Wanra ini

adalah untuk membantu pelaksanaan aktivitas Pembinaan Teritorial dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan serta membantu tugas Babinsa dalam mencari informasi perkembangan situasi di Kecamatan Balai Jaya secara dini. Agar anggota Wanra binaan Babinsa Koramil 08/Bagan Sinembah mampu bekerja dengan baik, maka rutin diberikan pengarahan terkait materi-materi bela negara, wawasan kebangsaan, dan rasa cinta tanah air, serta pengenalan teknik dasar militer dan Pelatihan Baris Berbaris (PBB), baik oleh Babinsa secara individu maupun Koramil 08/Bagan Sinembah secara satuan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) yang dilakukan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah di Kecamatan Balai Jaya pada tahun 2015 sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang menjadi anggota Wanra dan kemampuan Babinsa sebagai Aparat Komando Kewilayahan dalam membina Wanra tersebut.

C. Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos)

Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode penyelenggaraan Pembinaan Teritorial merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat bagi seluruh komponen bangsa. Selain itu, Komunikasi Sosial bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dan keeratn hubungan dengan seluruh komponen bangsa serta penyampaian kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi TNI AD dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan negara aspek darat dalam menghadapi hakekat ancaman yang mungkin timbul. Komunikasi Sosial antara

prajurit TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat perlu dijaga dan terus ditingkatkan sehingga menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial dengan seluruh komponen bangsa, para prajurit TNI AD harus memahami tentang pokok-pokok penyelenggaraan dan mampu melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos) ini dapat dilaksanakan secara formal maupun non formal oleh Koramil 08/Bagan Sinembah secara satuan maupun Babinsa jajaran Koramil 08/Bagan Sinembah secara individu.

Kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terbagi menjadi 2, diantaranya adalah :

1) Pembinaan Komunikasi Sosial Oleh Satuan

Sebagai Satuan Komando Kewilayahan yang menjadi bagian dari Upika di Kecamatan Balai Jaya, tentu saja Koramil 08/Bagan Sinembah senantiasa melakukan Pembinaan Komunikasi Sosial dengan komponen masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di wilayah tersebut. Adapun yang menjadi objek dalam kegiatan tersebut adalah seluruh Camat dan Penghulu di wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah.

2) Pembinaan Komunikasi Sosial Oleh Babinsa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari, seorang Babinsa memang telah menyatu dan tidak terlepas dari masyarakat, menjalin silaturahmi, anjongsana ke rumah-rumah masyarakat dan

aparatus pemerintah terkait, serta turut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bagian dari Binkomsos secara non formal yang dilakukan Babinsa di wilayah binaannya masing-masing. Selain Binkomsos secara non formal, Babinsa Koramil 08/Bagan Sinembah yang bertugas di Kecamatan Balai Jaya, juga melaksanakan kegiatan Binkomsos formal dengan objek sasaran yaitu komponen masyarakat seperti Penghulu/Lurah serta komponen terkait di masing-masing wilayah binaan.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dialog interaktif serta penyampaian materi yang bertujuan agar masyarakat semakin paham terhadap tugas pemberdayaan wilayah pertahanan dan Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh TNI AD. Materi yang disampaikan Babinsa dalam dialog interaktif tersebut berupa materi terkait penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD, seperti materi terkait kebijakan pimpinan TNI AD yang menyangkut visi, misi, peran, dan fungsi satkowl TNI AD, materi terkait Bhakti TNI, materi terkait wawasan kebangsaan, materi netralitas TNI AD, dan materi Balatkom.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diulas kembali mengenai pelaksanaan Binkomsos yang merupakan salah satu metode dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari pelaksanaan pemberdayaan pertahanan wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Serda Eris Saputra dan Bapak Wan Mulya Dharma, secara keseluruhan terkhususnya pada tahun 2015 yang lalu, kegiatan Binkomsos baik secara formal maupun non formal yang dilakukan oleh Babinsa jajaran Koramil 08/Bagan Sinembah di Kecamatan Balai Jaya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan keeratan dan koordinasi diantara semua

pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di Kecamatan Balai Jaya, baik secara satuan maupun individu.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

Dalam setiap aktivitas terkait penyelenggaraan Pembinaan Teritorial tentu saja diwarnai dengan berbagai faktor penghambat, sehingga menjadikan Pembinaan Teritorial selama ini masih belum dapat terselenggara dengan baik. Begitu juga dengan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 yang lalu, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraannya.

Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1) Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Yang Belum Memadai

Agar penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di Kecamatan Balai Jaya dapat berjalan maksimal, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Sampai saat ini, sarana dan prasarana inilah yang masih menjadi faktor penghambat bagi penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah, khususnya Kecamatan Balai Jaya. Saat ini hanya terdapat 4 unit kendaraan dinas (sepeda motor) dan 1 unit mobil patroli, yang jumlahnya sangat tidak ideal untuk mengakomodir 30 orang personel Koramil 08/Bagan Sinembah. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagian besar Babinsa Koramil 08/Bagan

Sinembah harus menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi menuju wilayah binaannya masing-masing. Tidak hanya itu saja, saat ini masih banyak Babinsa yang belum memiliki pos Babinsa dan jika pun ada, kondisinya sangat tidak layak untuk ditempati.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa selama ini fasilitas (sarana dan prasarana) yang diberikan kepada Babinsa masih belum sepadan dengan kinerja dari Babinsa itu sendiri. Namun, berbagai kendala tersebut tidak serta merta membuat Babinsa tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang prajurit, karena memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap prajurit untuk mengabdikan kepada negara dan membantu segala kesulitan masyarakat.

2) Jumlah Personil Dengan Luas Wilayah Binaan Tidak Sebanding

Saat ini Koramil 08/Bagan Sinembah memiliki wilayah binaan sebanyak 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Balai Jaya, dan Kecamatan Simpang Kanan, hal ini sangat tidak seimbang dengan jumlah personil yang hanya berjumlah 30 orang, padahal idealnya dalam satu kecamatan terdapat 1 (satu) Koramil. Pengembangan organisasi Koramil harus disesuaikan dengan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, sehingga wilayah binaan Koramil 08/Bagan Sinembah tidak terlalu luas lagi, dan Babinsa Koramil 08/Bagan Sinembah tidak lagi merangkap lebih dari 1 (satu) wilayah binaan. Seperti halnya di Kecamatan Balai Jaya, saat ini terdapat 7 orang personil Babinsa yang bertugas di 11 Kepenghuluan/Kelurahan, dimana rata-rata Babinsa di Kecamatan Balai Jaya membina lebih dari satu desa, meskipun letak desa yang satu dan lainnya tidak terlalu

berjauhan, namun tetap saja hal tersebut menjadikan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di Kecamatan Balai Jaya masih belum optimal.

3) Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Babinsa

Agar kinerja Babinsa berjalan semakin optimal, tentu saja harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan Babinsa. Saat ini keberadaan Babinsa masih kurang diperhatikan, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat, terlebih lagi Babinsa yang bertugas di daerah yang sudah berkembang (perkotaan). Secara umum anggaran yang diberikan kepada Babinsa masih terbatas jumlahnya, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pelda Suroyo, salah seorang Babinsa di Kecamatan Balai Jaya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keinginan Babinsa untuk mencari uang tambahan diluar tugasnya, sehingga mengurangi profesionalitas kinerja Babinsa dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Aparat Komando Kewilayahan yang mendukung tugas Koramil 08/Bagan Sinembah dalam menyelenggarakan Pembinaan Teritorial di wilayah tersebut. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menjaga citra baik TNI AD di kalangan sipil dan juga menjaga partisipasi masyarakat agar tetap ikut serta dalam mendukung tugas Babinsa sehari-hari.

B. Faktor Eksternal

1) Komponen Diluar TNI Yang Belum Sepenuhnya Paham Terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD

Kurang intensif dan meratanya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan TNI AD terkait tugas-tugas dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial, menyebabkan banyak dari kalangan aparat pemerintah maupun

masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal-hal tersebut, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial di wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Menanggapi hal tersebut, diharapkan kedepannya, TNI dapat melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial, termasuk sosialisasi metode Pembinaan Teritorial yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil, dan Binkomsos kepada Pemerintah Daerah, dengan memberikan pemahaman dan penjelasan yang mendalam tentang pentingnya ketiga metode Pembinaan Teritorial tersebut dalam membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu percepatan pembangunan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan memudahkan bagi Pemerintah Daerah untuk menerima dan mendukung program-program Pembinaan Teritorial yang ditawarkan oleh Satuan Komando Kewilayahan.

2) Pengaruh Globalisasi dan Perkembangan Zaman

Situasi global saat ini sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman menjadikan kesadaran bela negara, cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat terutama generasi muda, semakin melemah, padahal kesadaran tersebut merupakan landasan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) yang dianut negara Indonesia dimana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh sebagai bagian dari pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan dan mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Apabila hal tersebut telah terlaksana dengan baik,

maka Pembinaan Teritorial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, akan memperoleh hasil yang lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dilaksanakan menggunakan 3 metode, yaitu Bhakti TNI, Bintahwil, dan Binkomsos. Pelaksanaan ketiga metode tersebut dinilai sudah cukup baik, namun masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan kedepannya.
2. Dalam menyelenggarakan Pembinaan Teritorial desa di wilayah binaan, terutama di Kecamatan Balai Jaya, Koramil 08/Bagan Sinembah beserta para Babinsa dihadapkan pada beberapa hambatan, diantaranya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah personel dengan luas wilayah binaan yang tidak sebanding, tingkat kesejahteraan Babinsa yang belum terpenuhi, komponen diluar TNI yang belum sepenuhnya paham terhadap penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD, dan pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman, yang menyebabkan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, masih belum optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya adalah :

1. Koramil 08/Bagan Sinembah harus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di wilayah binaannya, terutama di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, Koramil 08/Bagan Sinembah sebagai Satkowil penyelenggara Pembinaan Teritorial Desa, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Babinsa. Kemudian untuk wilayah kerja Koramil 08/Bagan Sinembah harus lebih diintensifkan atau diperkecil, agar penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dapat berjalan optimal.
2. TNI AD secara umum, dan Koramil 08/Bagan Sinembah secara khusus, harus lebih intensif dan merata dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan TNI AD terkait tugas-tugas dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial, sehingga aparat pemerintah dan masyarakat, semakin dapat memahami metode Pembinaan Teritorial tersebut. Selain itu, kedepannya diharapkan Koramil 08/Bagan Sinembah dapat meningkatkan kesadaran bela negara, cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama generasi

muda, demi terwujudnya doktrin Sistem Pertahanan Semesta dan Kemanunggalan TNI dan Rakyat yang mendukung penyelenggaraan Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

- El Amady, Rawa. 2014. *Politik Militer Indonesia Konsolidasi Kekuasaan di Riau*. Yogyakarta : CV. Alif Gemilang Pressindo.
- Fattah, Abdoel. 2005. *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta : PT. LKis Pelangi Aksara.
- Pusat Teritorial Angkatan Darat. 2006. *Buku Modul Bhakti TNI A.PT.IX*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat.
- Pusat Teritorial Angkatan Darat. 2006. *Buku Modul Pembinaan Ketahanan Wilayah A.PT.X*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat.
- Pusat Teritorial Angkatan Darat. 2006. *Buku Modul Program Pembinaan Teritorial A.PT.III.6*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat.
- Pusat Teritorial Angkatan Darat. 2003. *Buku Pedoman Praktis Aparat Teritorial*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Pusat Teritorial. 2004. *Buku Petunjuk Lapangan Tentang Komando Rayon Militer Nomor PL : TER-04 (Skep Kasad Nomor : Skep/ 26 / IV /*

2004). Jakarta : Markas Besar Angkatan Darat.

Staf Umum Teritorial. 2002. *Buku Pedoman Tentang Pengumpulan Data Teritorial Komando Rayon Militer*. Jakarta : Markas Besar Angkatan Darat.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua Cetakan Keempat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Internet

Ary Nugraha dan Dr. Hasanuddin, M.Si dalam Jurnal “*Pergeseran Militer ke Politik Profesional : Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi*” (diakses pada 15 Februari 2016).

Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah. “*Binter, Bersatunya TNI-Rakyat Mengawal Negeri*”. (diakses melalui www.tniad.mil.id, pada 15 Juli 2016).

Tesis Susilo Endro Basuki, 2008. “*Peran TNI Angkatan Darat Dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi Tentang Kegiatan Pembinaan Teritorial Di Jajajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat)*”, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (diakses pada 23 Juni 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Sumber-Sumber Lain

Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. 2013. *Majalah Palagan Volume 14 No. 1 Edisi Maret 2013*.

Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso. 2008. *Majalah Patriot Edisi No.36 Tahun-IX Januari 2008*.